

**TINJAUAN ATAS PENGAKUAN PENDAPATAN PADA SISTEM
PELAPORAN TERA/TERA ULANG UPTD METROLOGI LEGAL KAB.
BANDUNG**

ABSTRAK

Laporan keuangan daerah merupakan salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada masyarakat atau pihak yang berkepentingan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang diperoleh daerah dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah hingga pendapatan sah lainnya. Salah satu permasalahan utama dalam akuntansi pendapatan yaitu saat mengakui pendapatannya, maka pengakuan pendapatan harus diakui secara andal sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penelitian ini dilakukan di UPTD Metrologi Legal Kab. Bandung yang berlokasi di Jl. Raya Cinunuk No. 204 Kab. Bandung. Sumber pendapatan pada UPTD Metrologi Legal ini yaitu dari Retribusi Tera/Tera Ulang. Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pengakuan pendapatan pada Sistem Tera/Tera Ulang dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 berbasis akrual. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik yang digunakan adalah studi lapangan, pengamatan/observasi, dan studi pustaka.

Berdasarkan hasil dari penelitian pada UPTD Metrologi Legal dapat disimpulkan bahwa pencatatan dalam mengakui pendapatan UPTD Metrologi telah dilaksanakan dengan baik namun dalam melaporkan pendapatan UPTD Metrologi Legal belum berpedoman pada PP Nomor 71 Tahun 2010 berbasis akrual dan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan sebagaimana mestinya.

Kata kunci: Pengakuan Pendapatan

THE REVIEW OF RECOGNITION OF INCOME IN THE REPORTING SYSTEM OF LEGAL METROLOGY UPTD BANDUNG DISTRICT

ABSTRACT

Regional financial report is a form of accountability of local governments to the community or interested parties. Based on Government Regulation No. 71 of 2010, Regional Original Revenue (PAD) is a source of revenue obtained by the region from the results of regional taxes, regional levies, separated regional wealth management to other legal income. One of the main problems in revenue accounting is that when recognizing revenue. Revenue recognition must be recognized reliably in accordance with Government Accounting Standards.

This research was conducted at the Legal Metrology UPTD, Bandung Regency, which is located on Jl. Raya Cinunuk No. 204 Bandung Regency. The source of income in this Legal Metrology UPTD is from the Retribution/Calibration Retribution. The purpose of this final project is to determine the suitability of revenue recognition in the Calibration System with Government Regulation no. 71 of 2010 on an accrual basis. The research method used is descriptive method, while the techniques used are field studies, observations, and literature studies.

Based on the results of research on the UPTD Metrology Legal, it can be concluded that the recording in acknowledging the revenue of the UPTD Metrology has been carried out properly but in reporting the income of the UPTD Metrology Legal has not been guided by PP No. 71 of 2010 based on accruals and Government Accounting Standards properly.

Keywords: Revenue Recognition